

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 7, Agustus 2025, P. 94-110

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16876984>

Evaluasi Strategi Pengembangan Budidaya Ikan (Sambang Budiman) Pada UPT Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) Ngoro Kabupaten Jombang

Arizal Kiswanto¹, Tjitjik Rahaju²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

e-mail: arizalkiswanto.21044@mhs.unesa.ac.id, tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Bidang Produksi Perikanan dalam mengoptimalkan peran dan melengkapi tugas UPT BPAT Ngoro yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebagai center of education (COE) bagi masyarakat. Karena sebelum program ini diresmikan, UPT masih terbatas dalam hal edukasi dan hanya menjalankan tupoksi lembaga untuk menghasilkan benih ikan berkualitas bagi pembudidaya. Bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan program strategi pengembangan budidaya ikan (Sambang Budiman) pada UPT Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) Ngoro Kabupaten Jombang menggunakan model evaluasi formal retrospektif menurut William N Dunn (2003) dengan 6 indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan hasil kinerja keempat kegiatan dari program Sambang Budiman berhasil menjadikan UPT BPAT Ngoro sebagai lembaga edukasi perikanan, namun masih terdapat tantangan struktural seperti keterbatasan kecukupan kegiatan rumah edukasi perikanan dalam menjangkau peserta didik, responsivitas melalui distribusi hasil penerima manfaat setelah mengikuti kegiatan bimtek, dan ketimpangan efisiensi SDM pada produksi benih ikan. Masukan yang diberikan adalah perhatian lebih disposisi implementor dalam menyoroti jurang (gap) potensial kegiatan pada program Sambang Budiman yang telah terealisasi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Program, Sambang Budiman, Strategi Pengembangan Budidaya

Abstract

This research is motivated by the efforts of the Fisheries Production Sector in optimizing the role and complementing the duties of the UPT BPAT Ngoro owned by the Food Security and Fisheries Service of Jombang Regency as a center of education (COE) for the community. Because before this program was inaugurated, the UPT was still limited in terms of education and only carried out the institutional duties to produce quality fish seeds for farmers. The aim is to evaluate and analyze the policy of the fish cultivation development strategy program (Sambang Budiman) at the UPT Freshwater Fisheries Cultivation (BPAT) Ngoro, Jombang Regency using a formal retrospective evaluation model according to William N Dunn (2003) with 6 indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research findings show that the performance results of the four activities of the Sambang Budiman program have succeeded in making UPT BPAT Ngoro a fisheries education institution, but there are still structural challenges such as the limited adequacy of fisheries education house activities in reaching students, responsiveness through the distribution of beneficiary results after participating in technical guidance activities, and inequality in human resource efficiency in fish seed production. The input given is more attention from the implementer's disposition in highlighting potential gaps in activities in the Sambang Budiman program that have been realized.

Keywords: Public Policy, Program Evaluation, Sambang Budiman, Cultivation Development Strategy

Article Info

Received date: 25 July 2025

Revised date: 27 July 2025

Accepted date: 10 August 2025

PENDAHULUAN

Potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia tentunya dapat dilihat dari berbagai sektor, antara lain sektor perikanan dan laut, pariwisata maritim, transportasi internasional, serta sektor lainnya (Sabir dan Mokodompit, 2023). Oleh karena potensinya, Pemerintah membagi tugas-tugas kewenangan kepada daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan guna mengoptimalisasi setiap urusan atau pemanfaatan atau mengelola dan mengawasi sumber daya alam kelautan yang tidak bisa diurus secara langsung oleh pemerintah pusat (Utomo, 2020). Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyatakan perolehan volume produksi perikanan budidaya di subsektor kolam menembus angka 283.152,8 ton selama periode tahun 2022 dengan nilai produksi mencapai 5 triliun rupiah, dari data nilai produksi perikanan subsektor kolam dengan indikator pendapatan per bulan (Rupiah) oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Jawa Timur Tahun 2022, peringkat produksi bulanan yang paling unggul diantaranya terjadi pada bulan April dengan total produksi tertinggi mencapai Rp500.289,492 Miliar, Bulan Desember dengan total produksi Rp484.185,968 Miliar, dan urutan ketiga pada Bulan Mei dengan total produksi Rp484.070,007 Miliar.

Produksi budidaya tidak lepas dari pembudidaya ikan itu sendiri, pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan sehingga potensi pengembangan usaha budidaya perikanan lebih mengacu pada kesesuaian daya dukung lingkungan fisik (salah satunya yaitu ketersediaan sumberdaya air) yang memungkinkan untuk dilaksanakannya usaha budidaya ikan (Arisandi dan Sambah, 2022). Potensi sumber daya manusia perikanan yaitu kelompok pembudidaya perikanan (pokdakan) yang menjadi aset keberhasilan pada Kabupaten Jombang untuk memproduksi dan memenuhi permintaan pasar dengan potensi pengembangan perikanan air tawar, adapun data produksi perikanan budidaya di Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Jombang Tahun 2023

No.	Jenis Komoditas Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Lele	6.977,3	128.061.450.000
2	Patin	1.561,2	25.397.600.000
3	Nila	202	3.914.700.000
4	Gurami	477,5	14.319.800.000
5	Tombro	210,1	4.252.200.000
6	Bawal Air Tawar	5.302,4	80.232.650.000
Total		14.730,5	256.178.000.000

(Sumber data: Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tahun 2023 (DKPP Kab. Jombang))

Capaian produksi perikanan budidaya sebesar 14.730,5 ton, Kabupaten Jombang menempati urutan ke-7 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, hasil dari budidaya tersebut sebagian besar dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar lokal Kabupaten Jombang. Lebih lanjut dalam meningkatkan produksi perikanan yang melibatkan sumber daya manusia sebagai pelaku pembudidaya ikan, terdapat tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 salah satunya menyusun kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, nelayan dan kelompok masyarakat pengawas. Unit Pelaksana Teknis Budidaya Perikanan Air Tawar (UPT BPAT) Ngoro Kabupaten Jombang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Kemudian pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang memiliki UPT Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) Ngoro yang selama ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan ikan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, UPTD Perbenihan Perikanan/BBI juga mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu, menjadi sarana bimbingan teknis secara langsung yang menyasar unit-unit Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) serta Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) atau masyarakat pembudidaya pada umumnya dalam rangka pengadaan dan pengendalian mutu benih (Herayani, 2023).

Permasalahan yang terjadi adalah peran Dinas dalam meningkatkan produksi ikan budidaya dimana selain pembenihan ikan yang telah diimplementasikan di UPT, produksi perikanan pada pembudidaya masih belum maksimal karena edukasi terhadap masyarakat belum terimplementasikan dengan baik di lokasi UPT. Lokasi UPT masih belum menjadi tempat bimbingan dan keterampilan atau rumah edukasi bagi pembudidaya ikan maupun peserta didik di Kabupaten Jombang dan selama ini masih terbatas sebagai penghasil benih ikan. Bidang Produksi Perikanan kemudian memberikan perbaikan infrastruktur di UPT melalui serangkaian strategi pengembangan program kegiatan yang merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan (pejabat eselon III) yaitu Strategi pengembangan budidaya ikan menuju mandiri pangan (Sambang Budiman) yang mencakup 4 strategi kegiatan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Strategi Pengembangan Budidaya Ikan (Sambang Budiman) Pada UPT BPAT Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2023

No.	Strategi	Rencana Aksi
1.	Rumah edukasi perikanan	Pusat informasi pembelajaran perikanan.
2.	Bimbingan teknis, pelatihan, dan sekolah lapang	Fasilitas pelatihan budidaya, mamfasilitasi sarana prasarana perikanan bagi pembudidaya ikan.
3.	Konsultasi akuakultur perikanan	Layanan konsultasi, tempat pengaduan
4.	Penghasil benih berkualitas	Ketersediaan benih/bibit ikan dari indukan yang tersertifikasi.

(Sumber data: Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tahun 2023 (DKPP Kab. Jombang))

UPT BPAT Ngoro sebagai tempat pengelolaan perikanan budidaya tercantum dalam (Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, pada Pasal 18 Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Budidaya Perikanan Air Tawar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan.
- b. Pelaksanaan kegiatan produksi benih dan induk unggul;
- c. Penyelenggaraan kegiatan kaji terap pengembangan ikan;
- d. Pelaksanaan bimbingan keterampilan;
- e. Penyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman teknis mengenai pembenihan dalam rangka program penyuluhan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dilakukan sebuah upaya bagaimana mengoptimalkan peran UPT yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk dapat memberikan pelayanan kepada pembudidaya ikan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan pembudidaya. Dukungan program dengan adanya Surat Keputusan yang bersifat teknis yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Nomor: 188/415.28/2024 tentang pembentukan tim kerja Sambang Budiman di UPT BPAT Ngoro dan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Nomor: 188/1899/415.28/2024 tentang kajian teknis dan standar operasional prosedur (SOP) Sambang Budiman di UPT BPAT Ngoro. Keberlanjutan kegiatan tersebut juga didukung Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.4.2/1006/415.28/2024 tentang pemanfaatan kegiatan "Sambang Budiman" di UPT BPAT Ngoro.

Dalam tahapan implementasi kegiatan yang dilakukan di UPT BPAT Ngoro adalah pembentukan dan pengesahan tim kerja, penyusunan dokumen kajian teknis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), sosialisasi dan launching terkait kegiatan, implementasi kegiatan berupa pengadaan bimbingan teknis, rumah edukasi perikanan, konsultasi perikanan, serta kegiatan yang menjadi tugas utama UPT yaitu produksi benih ikan bersertifikat. Bimbingan teknis, proses pemberian arahan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan pembudidaya ikan. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Lele dengan peserta 45 orang, narasumber pada pelaksanaan bimbingan teknis berasal dari Republik Rakyat Lele Kediri dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Setelah materi bimtek terdapat Sekolah lapang budidaya ikan dengan peserta sebanyak 45 orang yang dilaksanakan selama 2 hari dengan mengutamakan pengalaman langsung dan interaksi antar peserta seperti pokdakan lokal, praktisi perikanan dari Republik Lele Kabupaten Kediri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, dan UPT BPAT Ngoro. Baik bimbingan teknis dan sekolah lapang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tetapi dengan pendekatan yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih judul "Evaluasi Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Menuju Mandiri Pangan (Sambang Budiman) Pada UPT Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) Ngoro Kabupaten Jombang" yang dikaji menggunakan pendekatan evaluasi formal dengan analisis kebijakan retrospektif menurut Dunn (2003) dengan 6 indikator terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Peneliti mengkorelasikan antara teori evaluasi kebijakan formal retrospektif dengan fakta maupun fenomena yang terjadi di lapangan, "retrospektif" mengacu pada

evaluasi yang dilakukan setelah program atau kebijakan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

METODE

Penelitian tentang “Evaluasi Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Menuju Mandiri Pangan (Sambang Budiman) Pada UPT Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) Ngoro Kabupaten Jombang” ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif model evaluasi kebijakan formal dengan analisis kebijakan retrospektif menurut William N Dunn. Model evaluasi formal dan bersifat sumatif sesuai untuk penelitian evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan, target kebijakan telah ditetapkan dimana target utamanya yaitu pembudidaya ikan di Kabupaten Jombang. Dalam menilai dan melihat pencapaian dari indikator teori model evaluasi formal retrospektif yang bersifat sumatif dengan kasus kontrol yang bersifat tidak langsung, masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi. Sebaliknya masukan dan proses tersebut dianalisis secara retrospektif berdasarkan pada aksi-aksi yang telah dilakukan oleh lembaga (Dunn, 2003).

Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Prabawati et al., 2020). Lebih lanjut menurut Thomas R. Dye dalam (Rafani dan Lubis, 2024), mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, pilihan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III, beliau berpendapat tentang kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy statemen yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.” (Sastipi, 2023).

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan berupa program strategi pengembangan budidaya ikan menuju mandiri pangan (Sambang Budiman) pada UPT Budidaya Perikanan Air Tawar (BPAT) Ngoro Kabupaten Jombang. Penelitian ini meneliti dan mencari informasi tentang kinerja kebijakan program Sambang Budiman pasca pelaksanaan kegiatannya yang dilaksanakan di UPT secara menyeluruh dan mendetail. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk lebih memahami simbol atau angka pada data. Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah data yang diperoleh secara langsung dari Tim Kerja Sambang Budiman melalui hasil wawancara yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan (retrospektif), sementara data sekunder berasal dari dokumen asli, dan data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan yang relevan serta dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Struktur organisasi UPT Budidaya Perikanan Air Tawar Ngoro
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang 2024-2026.
3. Dokumen Laporan Implementasi Aksi Perubahan “Sambang Budiman,” Tahun 2024
4. Dokumen Profil UPT
5. Dokumen LKJIP UPT BPAT Ngoro Tahun 2024
6. Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi data dari hasil kuesioner, observasi, dan dokumentasi, sementara teknis analisis data mengenai evaluasi program menggunakan model analisis data dari Miles et al., (1992) dapat diterapkan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Strategi Pengembangan Budidaya Ikan (Sambang Budiman) dipelopori oleh Ibu Palupi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi Perikanan, program Sambang Budiman sebagai hasil dari Aksi Perubahan pada pejabat struktural eselon 3 dalam melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang bersifat wajib. Dilaksanakan berdasar pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 tentang rencana program dan

kegiatan serta pendanaan pada sasaran Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, meskipun tidak secara eksplisit menyebut “Sambang Budiman” dalam dokumen teknisnya. Dengan kegiatan dan sub kegiatan diantaranya: Pengelolaan pembudidayaan ikan, Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Sub Kegiatan baru di tahun 2024).

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Bidang Produksi Perikanan melakukan perbaikan infrastruktur di UPT dengan serangkaian strategi pengembangan yang mencakup 4 strategi yaitu:

1. Rumah edukasi perikanan;
2. Bimbingan teknis dan sekolah lapang;
3. Konsultasi perikanan;
4. Produksi benih ikan.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi UPT BPAT Ngoro sebagai fasilitas budidaya, memfasilitasi sarana prasarana perikanan bagi pembudidaya ikan, serta mampu memudahkan pembudidaya ikan lebih mengenal UPT untuk mendapatkan informasi seputar perikanan. Selain itu, program ini juga berperan dalam meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan terkait pengelolaan budidaya ikan termasuk pembenihan, perawatan, sampai masa panen sehingga dapat membantu pembudidaya ikan mendapatkan hasil panen yang lebih optimal.

Data yang terkumpul merupakan hasil dari serangkaian wawancara, observasi, dan dokumentasi selama periode penelitian dua bulan, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi kinerja kebijakan Program Sambang Budiman pada UPT BPAT Ngoro Kabupaten Jombang menggunakan 6 kriteria evaluasi formal oleh William N. Dunn sebagai acuan alat ukur pelaksanaan program, berikut adalah uraian hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Berbagai upaya dilakukan oleh Bidang Produksi Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam mencapai perbaikan sarana prasarana UPT, dalam menyelesaikan kendala yang terjadi selama program diimplementasikan. Sambang Budiman memiliki tujuan yang terbagi menjadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek adalah target kinerja optimalisasi fungsi edukasi UPT BPAT Ngoro yang diwujudkan selama kurun waktu 2 (dua) bulan dengan indikator capaian:

1. Tersedianya Dokumen Kajian "Sambang Budiman" (Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Menuju Mandiri Pangan) di UPT BPAT Ngoro
2. Tersedianya SOP "Sambang Budiman" (Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Menuju Mandiri Pangan) di UPT BPAT Ngoro
3. Terlaksananya Sosialisasi dan Launching "Sambang Budiman" sebagai pusat edukasi perikanan di UPT BPAT Ngoro
4. Terlaksananya Sambang Budiman 'Belajar Perikanan' berupa bimbingan teknis/sekolah lapang di UPT BPAT.

b. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah target kinerja optimalisasi fungsi edukasi UPT BPAT Ngoro yang diwujudkan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dengan indikator capaian:

1. Tersedianya video promosi kegiatan "Sambang Budiman" untuk disebarluaskan ke masyarakat
2. Terwujudnya keberlanjutan kegiatan edukasi kepada pembudidaya perikanan melalui Sambang Budiman di UPT BPAT Ngoro

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang target kinerja optimalisasi fungsi edukasi UPT BPAT Ngoro yang diwujudkan selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan indikator capaian:

1. Tertanganinya seluruh kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh edukasi perikanan melalui kegiatan Sambang Budiman.
2. Terlaksananya Sambang Budiman 'Belajar Perikanan Bersama Pelajar', yaitu kerjasama dengan lembaga pendidikan guna mendukung pembelajaran kurikulum merdeka.

3. UPT BPAT Ngoro sebagai COE (Center of Education) yaitu sebagai rumah edukasi perikanan di Kabupaten Jombang.

Efektivitas kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Sambang Budiman, efektivitas dapat dilihat dari keempat kegiatan teknis hasil implementasi program yaitu:

a. Efektivitas Rumah Edukasi Perikanan

Rumah Edukasi Perikanan bertujuan sebagai sarana pembelajaran terbuka bagi masyarakat, terutama pelajar dan pembudidaya pemula. Hasil observasi menunjukkan bahwa perbaikan sarana UPT cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dasar masyarakat tentang Budidaya Perikanan Air Tawar dan perikanan. Terdapat peningkatan jumlah kunjungan tiap bulan oleh pelajar Paud-TK dan Sekolah Dasar, edukasi perikanan terhadap peserta didik sudah terjadi semenjak UPT masih berbentuk lembaga Balai Benih Ikan (BBI) dengan kunjungan sukarelawan dari sekolah terdekat.

b. Efektifitas Bimbingan Teknis dan Sekolah Lapang

Efektivitas bimtek tentang budidaya ikan lele yang terlaksana pada Bulan Agustus 2024 di UPT BPAT Ngoro dapat dilihat melalui antusiasme peserta bimtek terhadap materi pada beberapa penggolongan rekap evaluasi oleh Bidang Produksi Perikanan setelah bimtek dilaksanakan (terlampir). Secara keseluruhan peserta bimtek telah mengisi form evaluasi yang berisikan tentang tanggapan terhadap staf/petugas bimtek (tim kerja Sambang Budiman), kejelasan pemateri atau narasumber, keadaan sarana dan prasarana edukasi yang dimiliki UPT, jenis materi yang disampaikan, dan dampak manfaat yang diterima oleh peserta (pembudidaya). Dari form evaluasi tadi rata rata mendapatkan nilai 2,92 dari kriteria penilaian memberi nilai satu sampai tiga pada setiap kolom pertanyaan yang ada pada form, artinya hampir seluruh rangkaian kegiatan bimtek yang dilakukan hari itu mendapat nilai baik atau *feedback* yang positif.

Secara spesifik efektivitas melihat sejauh mana suatu kegiatan dalam program Sambang Budiman telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di UPT BPAT Ngoro Kabupaten Jombang. Definisi efektivitas kemudian tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan jangka pendek, terdapat hal penting dalam mempertimbangkan hasil akhir (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang lebih luas dan berjangka panjang dari suatu kebijakan/program. Meskipun bimtek yang diadakan pada saat awal-awal Sambang Budiman diresmikan menunjukkan efektivitas yang memuaskan, tantangan utamanya kemudian adalah keterbatasan jangkauan peserta dan belum terlaksananya bimbingan secara berkala yang diadakan di UPT. Adapun rencana bimbingan teknis yang rencananya diselenggarakan pada triwulan ketiga periode Dinas di UPT BPAT Ngoro untuk tahun ini adalah bimtek dengan sasaran pelajar SMP.

c. Efektifitas Konsultasi Perikanan

Kegiatan konsultasi merupakan layanan teknis yang diberikan kepada petani ikan dalam mengatasi masalah budidaya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan masih kurang optimal, hal tersebut berkaitan dengan lokasi UPT dimana jarak antara konsumen dengan UPT yang berbeda tiap individunya sehingga pembudidaya lebih sering melakukan konsultasi bersamaan dengan pembelian benih ketika berkunjung ke lokasi UPT.

d. Efektifitas Produksi Benih Ikan

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Budidaya Perikanan Air Tawar bertujuan untuk meningkatkan produksi benih yang unggul dan berkualitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan. Untuk capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja UPT BPAT Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2024.

No.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana perbenihan	Jumlah Pengadaan Sarana	1unit pakan (2.895 kg)	1unit pakan (3.927,5 kg)	135,66 %
			1unit induk (100 ekor)	1unit induk (200 ekor)	200 %

	di UPT	Pembenihan di UPT			
--	--------	----------------------	--	--	--

(Sumber: Data diolah peneliti, Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) UPT BPAT Ngoro Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang)

Kinerja distribusi pakan pada periode ini menunjukkan pencapaian yang sangat memuaskan dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Target awal yang ditetapkan adalah penyediaan satu unit pakan dengan total 2.895 kg, sedangkan UPT berhasil merealisasikan distribusi pakan sebesar 3.927,5 kg. Lebih lanjut, pencapaian pembelian indukan menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi dua kali lipat dari target awal. Surplus sebesar 100 ekor atau 100% di atas target ini mencerminkan kemampuan yang sangat baik dalam pengadaan dan pengelolaan induk, capaian 200% mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pengadaan, dan manajemen sumber daya berjalan dengan efektif.

Adapun hasil produksi benih UPT tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian Produksi Benih UPT BPAT Ngoro 2024

Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi benih ikan: - Lele - Nila - Tombro - Guram	Produksi benih ikan 545.200 ekor (capaian produksi tahun 2023) dengan rincian sebagai berikut: - Lele: 404.000 ekor - Nila: 78.500 ekor - Tombro: 42.500 ekor - Gurami: 20.200 ekor	Produksi benih ikan 549.000 ekor dengan rincian sebagai berikut : - Lele: 407.000 ekor - Nila: 78.700 ekor - Tombro: 42.800 ekor - Gurami: 20.500 ekor	100,69% dari target yang ditentukan, dengan rincian sebagai berikut: - Lele: 100,74 % - Nila: 100,25 % - Tombro: 100,7% - Gurami: 101,48 %

(Sumber: Data diolah peneliti, Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) UPT BPAT Ngoro Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang)

Peningkatan produksi perikanan dapat dilihat dari hasil capaian produksi mencapai 545.200 ekor pada tahun 2023 menjadi 549.000 ekor di tahun 2024. Hal tersebut memungkinkan terjadi mengingat UPT telah memaksimalkan sumber daya yang ada mulai dari pembelian bibit indukan bersertifikat, pengeluaran pakan, pengelolaan pembudidayaan ikan termasuk kesehatan ikan dan kualitas prasarana berupa kolam serta pendukungnya, serta kemudahan akses distribusi benih untuk memenuhi kebutuhan lokal pembudidaya di Kabupaten Jombang layanan pesan antar menggunakan kendaraan roda tiga inventaris UPT. Kemudian terdapat peningkatan sarana informasi disediakan UPT dimana pembudidaya dapat mengetahui ketersediaan bibit yang ada ketika berkunjung ke lokasi UPT melalui papan informasi, namun pada beberapa bulan belakangan ini sudah tidak terbarukan lagi perkembangannya.

UPT BPAT NGORO PENGUMUMAN				
PERSIDIAN BIBIT IKAN MINGGU KE-2 BULAN MEI 2024				
NO	JENIS IKAN	UKURAN (cm)	JUMLAH	KETERANGAN
1	LELE	2cm	10000	
2	GURAMI	15cm	2000	
3	NILA	2cm	-	
4	TOMBO	2cm	-	

Gambar 1 Papan Informasi Ketersediaan Bibit
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2025)

Dalam menjaga ketersediaan stok benih dalam satu waktu karena perbedaan musim pemijahan yang berbeda antar komoditas, peningkatan sarana informasi disediakan UPT dimana pembudidaya dapat mengetahui ketersediaan bibit yang ada melalui papan informasi. Meskipun papan pengumuman ketersediaan stok bibit yang ada di UPT sudah disediakan, namun ditemukan permasalahan pada keberlanjutan informasi ini karena sudah tidak dilanjutkan lagi oleh staf teknis pembenihan. Data yang tertera pada gambar diatas adalah data tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 beberapa bulan belakangan ini sudah tidak terbarukan lagi perkembangannya.

Jika dibandingkan pada penelitian sebelumnya yaitu Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar pada Kelompok Swadaya Masyarakat "Balesemi" di Desa Bakalan Kabupaten Pasuruan, kegiatan Bimtek berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KSM "Balesemi" dalam budidaya ikan air tawar. Namun, perlu ada perhatian lebih pada aspek evaluasi dan keberlanjutan program untuk memastikan hasil yang optimal (Ernawati et al., 2024). Sementara penelitian ini memperhatikan aspek evaluasi salah satunya dengan melihat indikator efektivitas bimtek untuk mencapai tujuan jangka panjang program dilihat melalui keberlanjutan bimbingan teknis yang rencananya diselenggarakan di UPT BPAT Ngoro untuk periode triwulan ketiga tahun ini dengan sasaran pelajar SMP, bimtek yang diadakan di UPT menyesuaikan materi dan tempat pelaksanaan dengan memperhatikan tema serta kebutuhan sasaran di lapangan.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam konteks Program Sumbang Budiman, efisiensi dianalisis melalui perbandingan antara input dengan indikator efisiensi mencakup efisiensi biaya (*cost efficiency*), efisiensi waktu (*time efficiency*), dan efisiensi sumber daya manusia (*human resource efficiency*). Ketiga dimensi efisiensi ini saling berkaitan dan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja program secara keseluruhan dengan output berupa pencapaian target pada masing-masing kegiatan program.

a. Efisiensi Biaya (*cost efficiency*)

Dalam konteks kegiatan rumah edukasi perikanan, semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ditutupi oleh pihak sekolah tanpa meminta atau mengharapkan dana tambahan dari sumber lain. Pihak UPT hanya sebatas penyedia sarana dan prasarana pembelajaran untuk para siswa, sekolah yang mau berkunjung mengajukan permohonan melalui surat terlebih dahulu dan yang mengakomodasi semua kebutuhan siswa untuk datang ke UPT adalah pihak guru sekolah sendiri. Sama seperti rumah edukasi perikanan, efisiensi biaya layanan konsultasi perikanan menunjukkan biaya per konsultasi relatif efisien karena dalam melakukan konsultasi tidak dikenakan biaya sedikitpun. Konsultasi terbuka bagi pembudidaya yang bisa datang langsung ke UPT untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan masalah teknis terkait budidaya perikanan. Model konsultasi yang fleksibel baik secara langsung maupun virtual melalui media nomor *whatsapp* staf UPT yang bisa dihubungi memberikan nilai tambah dalam efisiensi biaya.

Kegiatan bimtek skala kecil lebih masuk akal jika dianalisis menggunakan analisis efisiensi biaya lebih bernilai ketimbang diskonting. Menurut Dunn dalam teori evaluasi kebijakannya, rumus efisiensi biaya (*cost-effectiveness*) adalah Efisiensi Biaya = $\text{Output} / \text{Input}$, Efisiensi Biaya = Hasil yang Dicapai / Biaya yang Dikeluarkan. Dunn juga mengembangkan konsep ini dalam beberapa variasi *Cost-Effectiveness Ratio* (CER): $\text{CER} = \text{Total Biaya Program} / \text{Jumlah Unit Output}$. Total Biaya tiap bimtek: Rp 8.000.000, Jumlah Unit *Output*: 45 orang peserta bimtek, CER: $\text{Rp } 8.000.000 \div 45 \text{ orang} = \text{Rp } 177.000 \text{ per orang}$. Artinya, biaya untuk memfasilitasi bimtek satu orang sebesar Rp 177.000. Analisis efisiensi biaya menunjukkan bahwa investasi per peserta Bimtek memberikan *return value* yang signifikan dalam bentuk peningkatan produktivitas usaha budidaya. Dari segi efisiensi biaya produksi, kegiatan ini menunjukkan kinerja yang kompetitif dengan unit produksi benih komersial usaha pembenihan rakyat (UPR). Biaya produksi per ekor benih yang dihasilkan berada dalam cakupan yang ekonomis, dengan kualitas benih yang memenuhi standar karena dihasilkan dari indukan yang telah bersertifikat. Untuk mengetahui efisiensi biaya produksi maka diukur dari *input* dan *output* anggaran terukur dari kegiatan produksi benih yang dilaksanakan mengacu pada realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran UPT BPAT Ngoro Tahun 2024

No.	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Presentase (%)
A.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	173.360.650,-	171.033.500,-	2.327.150,-	98,66
1.	Belanja Bibit Ternak	4.110.000,-	3.980.000,-	130.000,-	96,84
2.	Belanja Natura/Pakan	80.093.000,-	80.070.000,-	23.000,-	99,95
3.	Belanja Tenaga Administrasi	68.600.000	68.600.000	0,-	100
4.	Belanja Perjalanan Dinas	4.480.000,-	4.318.000,-	162.000,-	96,38
Jumlah		157.283.000,-	156.968.000,-	315.000,-	99,79

(Sumber: Data diolah peneliti, Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) UPT BPAT Ngoro Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang)

Berdasarkan data pada tabel diatas, rasio *input-output* menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal. Tingkat realisasi anggaran mencapai 99,79% menunjukkan efisiensi yang sangat baik dalam aspek optimalisasi anggaran, dimana hampir seluruh anggaran yang dialokasikan berhasil dimanfaatkan untuk kegiatan yang telah direncanakan

b. Efisiensi Waktu (*Time Efficiency*)

Setiap sesi pembelajaran rumah edukasi perikanan dibagi menjadi tiga tahap utama dengan durasi total 2-3 jam. Tahap pertama kegiatan diawali dengan Senam Gemari (Gemar Makan Ikan) selama 10 menit, kemudian dilanjutkan tahap dua pengenalan edukasi gemar makan ikan selama 30 menit, dan tahap ketiga diakhiri turun lapangan dimana siswa diperkenalkan dengan jenis-jenis ikan, habitat, dan interaksi langsung lewat pemberian pakan serta menangkap ikan budidaya. Sedangkan target waktu pelaksanaan pada bimbingan teknis dengan durasi bimtek yang diperkirakan 4 jam selesai dalam 3 jam tanpa mengurangi inti materi. Output kegiatan berupa target penyelesaian kegiatan dalam 3 bulan dilaksanakan bimtek sekali dengan 80% peserta mendapatkan edukasi keterampilan perikanan budidaya. Tingkat partisipasi dan penyelesaian kegiatan selama kurun waktu dua hari berturut mengindikasikan efisiensi waktu yang baik, hari pertama digunakan untuk pembelajaran materi ruang sedangkan hari kedua digunakan untuk praktek dari hasil pelatihan yang diberikan.

Aspek efisiensi waktu dalam layanan konsultasi tercermin dari responsivitas staf UPT dalam menanggapi kebutuhan pembudidaya. Selama masih pada jam operasional dari pukul 8 pagi hingga 3 sore, UPT menawarkan layanan konsultasi yang fleksibel. Tidak perlu menunggu sampai besok jika terdapat masalah mendesak, pembudidaya dapat langsung datang untuk konsultasi perikanan kapan saja selama UPT masih beroperasi. Kemudian pada kegiatan produksi benih memiliki penilaian efisiensi waktu yang kompleks karena produksi benih berfokus pada optimalisasi proses biologis untuk mencapai jumlah produksi benih tahunan, bukan berdasarkan jam kerja. Input waktu produksi disesuaikan mengikuti siklus pembenihan tiap komoditas ikan budidaya dimana komoditas ikan lele lebih cepat untuk masa pertumbuhannya dibanding ketiga komoditas lain.

c. Efisiensi Sumber Daya Manusi (*Human Resource Efficiency*).

Dalam melaksanakan edukasi, UPT dibantu oleh empat staf yang siap menjadi pendamping, masing-masing dengan fokus materi yang berbeda. Satu staf pengelola pengembangan budidaya dan pemasaran perikanan mengkoordinir siswa dibantu dengan guru sekolah untuk menertibkan siswa sebelum diarahkan senam gemari dan materi edukasi di ruang kelas, sedangkan staf teknis pembenihan bagian materi praktek menunjukkan prasarana budidaya ikan yang ada di UPT. Kemudian, efisiensi sumber daya manusia dalam kegiatan Bimtek tercermin dari optimalisasi peran instruktur dan tenaga pendukung. Perhitungan jangkauan per Pemateri dimana pemateri berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sejumlah 2 orang berbanding jumlah peserta bimbingan teknis dengan uraian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jangkauan per Pemateri} &= \text{Total Audiens} / \text{Jumlah Pemateri} \\ &= 45 \text{ orang} / 2 \text{ pemateri} \\ &= 22 \text{ audiens per pemateri.}\end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut menunjukkan rata-rata jumlah audiens yang dijangkau oleh setiap pemateri dalam satu sesi bimbingan teknis. Efisiensi sumber daya manusia tergolong efisien mengingat pemateri juga tidak sendirian melainkan dibantu juga oleh tim kerja Sambang Budiman. Lebih lanjut spesialisasi kegiatan konsultasi, pembagian pengalaman kerja berdasarkan bidang keahlian (pembenihan, budidaya, kesehatan ikan) oleh tiga staf operasional pengelolaan budidaya ikan di UPT. Ketika salah satu staf teknis pembenihan ada yang izin atau masih keluar UPT, konsultasi bisa dilakukan dengan staf lain mengingat semua staf berasal dari lulusan akademisi perikanan yang paham dibidangnya.

Optimalisasi sumber daya manusia yang ada pada UPT dapat dilihat melalui rasio perbandingan input dengan *output* yang dihasilkan dengan input 5 staf yang bertugas pada operasional UPT pada tahun 2024 dimana satu orang bertugas di bagian administrasi atau tata usaha dan empat staf operasional pengelolaan budidaya ikan mulai dari perkenbangan ikan (pembibitan, pemijahan, pendederan), pemberian pakan, pengawasan kesehatan, sampai pemanenan. Akan tetapi pada pertengahan tahun, salah satu staf teknis pindah jabatan sehingga terdapat reshuffle tanggung jawab staf teknis pembenihan yang awalnya ada empat staf tinggal tiga staf tersisa. Terkait produksi benih jika melihat hasil penelitian pada BBI Sukomananti yang juga berhasil menyediakan benih berkualitas, tetapi gagal memenuhi kebutuhan kuantitas pembudidaya. Faktor sumber daya ikan menjadi kunci utama keberhasilan, sementara aspek teknologi, kelembagaan, dan sosial belum optimal. Perlu strategi holistik untuk meningkatkan kapasitas produksi dan sinergi dengan pembudidaya (Aisyah et al., 2022). Sementara pada UPT BPAT Ngoro, strategi holistik yang dilaksanakan adalah serangkaian optimalisasi sarana prasarana UPT pada kegiatan teknis lembaganya dalam satu kesatuan program Sambang Budiman.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Dalam konteks perbaikan sarana dan prasarana UPT, kecukupan dapat diukur melalui beberapa dimensi. Pertama, kecukupan kuantitatif yang melihat apakah jumlah output program sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan target sasaran. Kedua, kecukupan kualitatif yang mengevaluasi apakah kualitas layanan atau output program sudah sesuai dengan standar yang diperlukan. Ketiga, kecukupan cakupan yang menganalisis apakah jangkauan program sudah mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan. Keempat, kecukupan keberlanjutan yang menilai apakah dampak program dapat bertahan dalam jangka panjang.

Kecukupan kuantitatif yang melihat output program sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan target sasaran yaitu pada observasi lapangan yang menunjukkan bahwa kegiatan rumah edukasi perikanan memiliki ketersediaan materi pembelajaran gemarikan untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran siswa pada tingkat pendidikan TK PAUD. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan bahwa pihak sekolah masih mengadakan pembelajaran luar kelas dengan belajar di UPT sebagai fasilitator rumah edukasi perikanan. Sedangkan pada kegiatan bimtek, frekuensi penyelenggaraan bimtek masih belum optimal dibandingkan dengan kebutuhan pendampingan yang diperlukan pembudidaya yang idealnya bimtek perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, keberlanjutan bimtek dapat dijamin seperti temuan pada indikator efektivitas bahwa terdapat perencanaan bimbingan teknis yang rencananya diselenggarakan di UPT BPAT Ngoro pada tahun ini dengan sasaran kegiatan adalah pelajar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kecukupan kuantitatif layanan konsultasi perikanan dapat diukur dari ketersediaan konsultan atau staf yang dapat memberikan layanan, jam operasional layanan, dan kapasitas layanan dalam menangani jumlah konsultasi yang masuk. Observasi lapangan menunjukkan bahwa jumlah tenaga konsultan (tiga staf teknis perikanan) yang tersedia sudah cukup untuk mengatasi keluhan pembudidaya sesuai dengan keempat komoditas ikan yang tersedia (lele, nila, tombro, gurame). Sedangkan kegiatan produksi benih ikan dapat dianalisis dengan membandingkan kapasitas produksi yang ada dengan capaian produksi tahunan sebelumnya, data LKJIP UPT menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan kapasitas produksi benih namun efisiensi anggaran yang digunakan hampir memakai seluruh anggaran yang diberikan oleh Dinas untuk menjalankan operasional kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan selama satu tahun seperti pada tabel 1. 4 dan tabel 1. 5 pada indikator efektivitas dan efisiensi sebelumnya.

Kecukupan kualitatif menilai kualitas layanan atau output program sudah sesuai dengan standar yang diperlukan, fasilitas kegiatan rumah edukasi yang ada umumnya telah dilengkapi dengan fasilitas ruang kelas yang mampu menampung peserta dan media pembelajaran yang memadai untuk memberikan edukasi dasar tentang ikan air tawar. Jumlah fasilitas ruang kelas yang ada dan beroperasi sudah cukup untuk digunakan sebagai tempat dilaksanakannya materi edukasi siswa. Terdapat satu ruang kelas dengan daya tampung 50 orang dewasa untuk pemaparan materi dan satu pendopo yang bisa digunakan untuk senam gemari.



Gambar 2 Edukasi Gemarikan di Ruang Kelas UPT BPAT Ngoro
(Sumber: Diolah Peneliti, Dokumentasi UPT 2025)

Pembelajaran berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan memanfaatkan fasilitas ruang kelas yang ada di UPT Budidaya Perikanan Air Tawar Ngoro. Ruang kelas yang cukup luas menjadi tempat ideal untuk menyampaikan materi edukasi perikanan. Peserta mendapat kesempatan untuk memahami berbagai aspek perikanan mulai dari budidaya ikan hingga nilai gizi ikan melalui materi Gemarikan. Kemudian kecukupan kualitatif bimbingan teknis materi bimtek yang disampaikan umumnya telah sesuai dengan kebutuhan dasar pembudidaya terlebih tantangan-tantangan teknis budidaya yang dihadapi di lapangan. Untuk menilai kecukupan materi bimtek, dapat dilihat melalui pengukuran produktivitas pemateri dimana yang diperhatikan adalah output yang dihasilkan oleh pemateri selama bimbingan berlangsung.

Tabel 6 Rekap Form Evaluasi Sambang Budiman Bagian Dampak dan Manfaat Materi Bimbingan Teknis.

BAGIAN V		
Dampak dan Manfaat	Penambahan pengetahuan dan ketrampilan bagi peserta	Kemampuan untuk menerapkan ilmu dilapangan oleh peserta
Rata-rata	2,96	2,89
Total rata-rata IV		2,92

(Sumber: Data diolah peneliti, Laporan Implementasi Aksi Perubahan “Sambang Budiman” di UPT BPAT Ngoro Tahun 2024)

Kualitas pemateri bimtek juga menjadi faktor penentu transfer ilmu, dimana kemampuan komunikasi yang baik dapat menyampaikan materi secara efektif kepada pembudidaya dengan latar belakang yang beragam. Data evaluasi yang dilakukan tim Sambang Budiman setelah pelaksanaan bimtek menilai kecukupan cakupan dampak dan manfaat terhadap pembudidaya. Nilai dari 45 responden menunjukkan bahwa kegiatan bimtek mampu menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi peserta dan penerapan ilmu materi di lapangan setelah mengikuti bimtek dengan total nilai rata-rata 2,92 dari nilai maksimal kuesioner sebesar 3 poin.

Dari perspektif kecukupan kualitatif layanan konsultasi yang diberikan, sebagian besar sudah memiliki standar kualitas yang baik dengan melibatkan staf operasional UPT yang kompeten di bidang perikanan budidaya sesuai dengan keempat komoditas yang dikembangkan. Namun, masih terdapat celah dalam bibit yang tersedia, dimana pembudidaya datang ke UPT untuk membeli bibit sekaligus berkonsultasi sedang terdapat tantangan seperti bibit ikan yang belum semuanya tersedia dalam satu waktu menyebabkan pembudidaya jarang mendatangi UPT untuk berkonsultasi. Lebih lanjut, kegiatan produksi benih ikan sudah sesuai dengan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), implementasi yang konsisten terhadap seluruh aspek CBIB telah menghasilkan benih ikan berkualitas tinggi untuk memenuhi capaian target produksi UPT dan mendukung pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Jombang. Selain itu, keragaman genetik benih juga diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan produktivitas budidaya dalam jangka panjang, benih ikan yang dihasilkan oleh UPT umumnya telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dengan tingkat *survival rate* dan pertumbuhan yang baik.

Kecukupan kegiatan bimtek ditunjukkan melalui frekuensi penyelenggaraan bimtek yang diselenggarakan di UPT masih belum optimal karena materi bimtek menyesuaikan kebutuhan pembudidaya. Idealnya, bimtek perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan transfer teknologi dan pengetahuan dapat diserap dengan baik. Kabar baiknya keberlanjutan bimtek yang diadakan di UPT sudah direncanakan untuk periode triwulanan ketiga pada tahun ini, secara tidak langsung observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan bimtek yang diadakan di UPT diselenggarakan setidaknya satu tahun sekali disela waktu periode tahunan dinas dengan jangka waktu tiap bimtek yang diadakan 3 bulan sekali setelah bimtek yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang terealisasi.

4. Perataan (*Alignment*)

Kriteria perataan dibagi menjadi dua aspek yaitu melihat perataan dari aspek pembagian tugas kepada para tim kerja Sambang Budiman di UPT, apakah pembagian tugas untuk menjalankan keempat kegiatan teknis dari strategi program sudah merata dan melihat aspek perataan dari aspek manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh penerima manfaat program yaitu masyarakat khususnya pembudidaya ikan. Untuk mencapai target yang diinginkan, diperlukan suatu usaha yang dalam kelembagaan mencakup tugas dan fungsi yang perlu dikerjakan, kegiatan yang perlu dijalankan dengan adanya pembagian tugas yang merata pada setiap individu yang ada dimana dalam program ini adalah Tim Kerja Sambang Budiman.

Pembagian tugas untuk menjalankan keempat kegiatan teknis dari strategi program apakah sudah merata dapat dilihat pada perataan pembagian tugas Tim Kerja Sambang Budiman melalui *Standard Operating Procedures* (SOP) yang juga berperan sebagai alat kontrol internal dalam mendukung sistem audit dan pemantauan kinerja, serta meningkatkan perataan program melalui penguatan mekanisme koordinasi. Selain pada kriteria perataan dengan melihat pembagian tugas kepada masing-masing pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja Sambang Budiman, kriteria perataan juga melihat dari manfaat yang dihasilkan oleh program apakah sudah dirasakan secara merata kepada masyarakat selaku sasaran program. Akses setara untuk hasil setara, maka kegiatan rumah edukasi perikanan memiliki keterbatasan akses bagi sekolah yang jauh dari lokasi UPT karena biaya transportasi dapat menghambat partisipasi siswa sedangkan akomodasi biaya sepenuhnya merupakan tanggung jawab sekolah sebagai pelopor pembelajaran luar kelas dan UPT sebatas penyedia sarana prasarana edukasi.

Selain evaluasi pemerataan melalui pembagian tugas Tim Kerja Sambang Budiman, kriteria ini juga mengukur pemerataan manfaat program bagi pembudidaya dan pelajar. UPT sebagai fasilitator menghadapi dilema dalam memastikan akses yang setara bagi seluruh sekolah, akses menjadi masalah besar bagi sekolah berjarak jauh dari UPT selain kesulitan mengakses layanan, jarak tersebut juga berdampak pada aspek anggaran mobilisasi siswa oleh sekolah. Biaya transportasi yang tinggi menjadi hambatan bagi sekolah-sekolah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan edukasi perikanan, hal ini menciptakan ketimpangan akses dimana sekolah yang lebih dekat dengan lokasi UPT memiliki keunggulan dibandingkan sekolah yang lokasinya lebih jauh. Kemudian, untuk melihat meratanya manfaat pada kegiatan bimtek dapat dilihat melalui hasil evaluasi kegiatan melalui tabel rekap form evaluasi setelah mengikuti kegiatan khususnya rangkaian kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan di UPT BPAT Ngoro sebagai berikut:

Tabel 7 Rekap Form Evaluasi Sambang Budiman Bagian Sarana dan Prasarana UPT

BAGIAN III				
Sarana dan Prasarana Tempat Edukasi	Bagaimana kebersihan tempat edukasi	Bagaimana kelengkapan sarana prasarana edukasi	Apakah UPT BPAT Ngoro berfungsi sebagai tempat edukasi	Bagaimana suasana UPT BPAT Ngoro untuk kegiatan edukasi
Rata-rata	2,87	2,76	2,95	2,93
Total rata-rata				2,88

(Sumber: Data diolah peneliti, Laporan Implementasi Aksi Perubahan “Sambang Budiman” Tahun 2024)

Dari data respon pembudidaya yang telah mengikuti bimtek di UPT Budidaya Perikanan Air Tawar Ngoro, dapat diketahui bahwa keempat indikator form evaluasi telah terpenuhi dengan baik ditunjukkan dengan nilai total rata-rata 2,88 atau baik. Respon positif ini menjadi validasi bahwa UPT telah menjalankan perannya secara efektif sebagai penyelenggara bimbingan teknis, Bidang Produksi Perikanan dan UPT terus berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam mendukung pengembangan sektor Budidaya Perikanan Air Tawar. Meskipun kegiatan bimtek memperlihatkan output yang positif, disisi lain ditemukan kesenjangan akses layanan pada kegiatan konsultasi perikanan dikarenakan pembudidaya yang bertempat tinggal jauh dari lokasi UPT. Keterbatasan jangkauan dan minat pembudidaya untuk mengunjungi lokasi menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan konsultasi. Oleh karenanya disiapkan layanan konsultasi pribadi melalui whatsapp yang memungkinkan komunikasi langsung antara pembudidaya dengan staf teknis pembenihan.

Lebih lanjut, kegiatan produksi benih di UPT bertujuan untuk menghasilkan benih ikan (beragam usia dan ukuran) dari 4 komoditas utama yaitu ikan nila, ikan lele, ikan tombro, dan ikan gurame dalam jumlah yang memadai dan berkualitas baik. Sasaran utamanya mengejar capaian produksi tahunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan benih para pembudidaya. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pemerataan dengan 3 staf teknis pembenihan yang menangani 4 komoditas ikan, terdapat potensi ketidakmerataan distribusi beban kerja dengan analisis pembagian tugas. Mas Asril menangani pembenihan ikan lele (1 komoditas), kemudian Mas Denny menangani pembenihan ikan nila (1 komoditas), sedangkan Mas Udin menangani pembenihan ikan tombro dan gurame (2 komoditas). Meskipun secara kuantitatif kurang seimbang, terdapat juga kompleksitas pembenihan yang berbeda antar komoditas. Ikan gurame memiliki tingkat kesulitan pembenihan yang lebih tinggi dibandingkan nila dan lele, sehingga beban kerja Mas Udin cenderung lebih berat. Terdapat tantangan signifikan dalam distribusi beban kerja diantara 3 staf teknis pembenihan yang harus mengelola 168 petak kolam permanen dengan total luas 7.658 m² untuk menghasilkan benih berkualitas.

5. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yakni adanya interaksi dari pelaksana kebijakan maupun sasaran dari kebijakan, responsivitas dalam kebijakan berupa program dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan kebijakan. Responsivitas dalam penelitian ini ditujukan untuk menilai respon yang diberikan mengenai sarana dan prasarana yang UPT sediakan untuk pembudidaya, penilaian responsivitas dalam kebijakan berupa Program Sambang Budiman dapat dilihat melalui dua perspektif yaitu dari sisi pelaksana kebijakan (Dinas Perikanan) dan sasaran kebijakan (pembudidaya) lewat tanggapan atas diterapkannya kebijakan program “Sambang Budiman” di UPT BPAT Ngoro.

Terdapat tanggapan dari Staf UPT mengenai pelaksanaan program dilakukan, keberhasilan kegiatan rumah edukasi perikanan terbukti dari banyaknya surat permohonan yang masuk ke UPT dari berbagai sekolah TK khususnya di bulan bulan tahun ajaran baru pada Bulan September sampai November, pihak UPT telah memenuhi kebutuhan pendidikan karakter dan pengenalan gizi yang tepat sasaran menyesuaikan dengan pesertanya yang terdiri dari anak-anak usia dini sekaligus membuktikan efektivitas UPT dalam menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Lebih lanjut, tanggapan dari pemangku kebijakan yaitu melalui monitoring dan evaluasi terhadap Program Sambang Budiman khususnya pada kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan karena menjadi permintaan Bidang Produksi Perikanan untuk laporan pertanggungjawaban karena telah melaksanakan program. Berikut merupakan hasil evaluasi berupa rekap form evaluasi pasca kegiatan bimbingan teknis terkait respon pembudidaya mengenai peningkatan pengetahuan teknik budidaya ikan ikan lele yang baik dan benar:

Tabel 8 Rekap Form Evaluasi Sambang Budiman Bagian Sarana dan Prasarana UPT

BAGIAN IV				
Jenis Materi	Materi yang diberikan sesuai dan menjawab kebutuhan ilmu teknis bagi peserta	Kejelasan materi yang disampaikan oleh narasumber	Kemudahan materi untuk dipahami oleh peserta	Kebermanfaatan materi bagi peserta
Rata-rata	2,91	2,93	2,93	2,96
Total rata-rata				2,93

(Sumber: Data diolah peneliti, Laporan Implementasi Aksi Perubahan “Sambang Budiman” di UPT BPAT Ngoro Tahun 2024)

Rekap form evaluasi dan monitoring peningkatan pengetahuan teknik pembudidaya ikan dibuat oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan sebagai bentuk pelaporan terkait penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta setelah mengikuti bimbingan teknis hari pertama dan kemampuan untuk menerapkan ilmu dilapangan oleh peserta pada sekolah lapang. Rata-rata penilaian dari peserta bimtek mendapat nilai 2,93 dari 3 poin maksimal yang bisa diberikan untuk menilai implementasi kegiatan, hal tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan pada bimtek memiliki kebermanfaatan pada pembudidaya yang mengikuti dan menambah keilmuan serta wawasan mereka. Evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan sebagai alat refleksi untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan jangka pendek, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Dengan melakukan evaluasi, pelaksana program dapat memperoleh umpan balik, umpan balik ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien

6. Ketepatan (Accuracy)

Akhir dari pelaksanaan kebijakan yaitu melihat sejauh mana tujuan-tujuan dari kebijakan yang ditetapkan telah tepat sesuai dengan perencanaan di awal. Menurut Dunn (2003) kriteria ketepatan berhubungan dengan pengambilan kebijakan ini sebagai alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah seberapa tepat dan layak. Kriteria ketepatan memberikan arti bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program harus tepat sasaran dan tepat pelaksanaannya. Dalam konteks Sambang Budiman, ketepatan dapat diukur melalui berbagai dimensi yaitu ketepatan dalam mengatasi permasalahan edukasi Budidaya Perikanan Air Tawar yang ada di UPT, dan ketepatan sasaran program khususnya ketepatan penentuan mengikuti bimbingan teknis.

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang telah diselenggarakan di UPT merupakan langkah strategis dan tepat sasaran dalam mendukung optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) UPT BPAT Ngoro. Artinya pada program Sambang Budiman (4 strategi), lahir 3 strategi kegiatan tambahan dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia UPT dalam sektor edukasi budidaya perikanan air tawar melalui penyempurnaan tupoksi. Pembinaan terhadap masyarakat belum terimplementasikan dengan baik di lokasi UPT dan karena belum menjadi tempat bimbingan dan keterampilan (bimtek) bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Jombang karena selama ini hanya berfungsi sebagai lembaga penghasil benih bersertifikat, belum menjadi rumah edukasi pembudidaya di Jombang sebagaimana ditegaskan Ibu Palupi selaku Kepala Bidang Produksi Perikanan: “Penyediaan benih ikan itu kegiatan rutinitas di UPT jadi tuisi UPT yang lain belum terlaksana, ada beberapa fasilitas penunjang yang belum ada contohnya informasi ketersediaan bibit, bimtek buat pembudidaya, sekolah lapang.”

Ketepatan ini tercermin dari cara program mengisi gap yang ada, jika UPT selama ini berperan sebagai “penghasil benih berkualitas” maka program Bidang Produksi Perikanan berperan sebagai “fasilitator pengembangan tupoksi UPT” yang memastikan ilmu perikanan budidaya dapat ditransformasi menjadi keberhasilan dalam menyempurnakan fasilitasi pelayanan edukasi kepada pembudidaya di Kabupaten Jombang. Sasaran program adalah pembudidaya ikan terlebih pada kegiatan bimtek, pembudidaya ikan merupakan komponen penggerak dalam mencapai swasembada ikan dan meningkatkan produksi perikanan nasional. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai ketepatan sasaran dari kegiatan bimbingan teknis Sambang Budiman, Sambang Budiman tidak memiliki kriteria spesifik dalam menerima pembudidaya ikan sebagai sasaran utama untuk ikut andil selama kegiatan bimbingan teknis UPT. Pemilihan peserta bimbingan dilakukan dengan bantuan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) untuk mendata pembudidaya yang butuh dan mau mengikuti bimbingan teknis, monitoring PPL membuka ruang kolaboratif dan partisipatif dengan berbagai pihak termasuk kelompok perikanan, akademisi, dan instansi terkait guna menciptakan ekosistem perikanan air tawar yang lebih maju.

Pada penelitian “Analisis Peran Balai Benih Ikan (BBI) Rappoa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”, program penyuluhan dimana terdapat informasi yang kurang jelas terkait dengan adanya jadwal, pelatihan dan bimbingan dimana pengertian dari penyuluhan dan latihan bimbingan teknis adalah dua hal yang berbeda (Wahyuti dan Manda, 2023). Sedangkan pembinaan terhadap masyarakat sudah terimplementasikan dengan baik di lokasi UPT, sasaran internal di UPT sudah tepat terpenuhi melalui promosi bimtek yang tercapai karena peserta dipilih oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) secara langsung. Peserta bimtek bukan hanya berasal dari kelompok perikanan (pokdakan) saja, namun juga berasal dari pembudidaya perseorangan yang tidak tergabung dalam kelompok karena sedikitnya jumlah pembudidaya yang ada di wilayahnya sehingga belum memungkinkan untuk membentuk sebuah kelompok.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi model Dunn terhadap Program Sambang Budiman di UPT BPAT Ngoro, dapat disimpulkan bahwa program ini secara keseluruhan efektif dalam mencapai tujuan substantif jangka panjangnya sebagai rumah edukasi perikanan (COE) dan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Program membuktikan efisiensi dalam pemanfaatan input, terutama pada kegiatan Rumah Edukasi Perikanan dan Konsultasi (biaya) serta Produksi Benih (SDM), meskipun memerlukan perbaikan manajemen waktu dan SDM terkait distribusi beban kerja yang tidak merata di unit pembenihan. Kecukupan program dipertanyakan akibat tantangan struktural seperti frekuensi Bimtek yang rendah, rencana sasaran Bimtek yang perlu dikaji ulang, serta ketidaktersediaan benih dan informasi up-to-date yang menghambat kunjungan pembudidaya, meskipun standar kualitas output dan kelengkapan fasilitas edukasi telah terpenuhi.

Distribusi manfaat belum merata, ditandai ketimpangan akses fisik bagi sekolah jauh akibat biaya transportasi dan potensi ketidakadilan beban kerja internal, sehingga pencapaian keadilan masih bersifat parsial. Namun, program sangat responsif terhadap kebutuhan spesifik sasaran (seperti preferensi waktu sekolah) dan memiliki relevansi yang tinggi dengan tugas pokok fungsi kelembagaan tanpa duplikasi, penjangkauan sasaran akurat, serta pelaksanaan terstruktur. Secara keseluruhan, Sambang Budiman telah memfasilitasi akses informasi dan edukasi, tetapi perlu reorientasi ulang dengan indikator capaian

berbasis dampak masyarakat serta perbaikan khusus pada aspek kecukupan, pemerataan akses, dan distribusi beban kerja internal untuk mewujudkan keadilan akses edukasi yang menyeluruh bagi pembudidaya di Kabupaten Jombang.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan terkait evaluasi “Sambang Budiman” pada UPT BPAT Ngoro Kabupaten Jombang, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Rumah Edukasi Perikanan: Mengembangkan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk menjangkau minat guru sekolah usia dini belajar terkait edukasi perikanan di UPT BPAT Ngoro karena distribusi manfaat yang belum merata (perataan).
2. Bimtek: Meningkatkan frekuensi bimtek di UPT (sesuai rencana triwulanan), meningkatkan jangkauan kecukupan sasaran Sambang Budiman secara signifikan untuk mencapai tujuan program jangka panjang (kecukupan).
3. Ketersediaan dan Informasi Benih: Membangun kembali sistem informasi ketersediaan stok benih *real-time* melalui papan informasi untuk melanjutkan amanah Bidang Produksi Perikanan demi menjamin pelayanan prima (efektivitas).
4. Produksi Benih: Untuk menyeimbangkan distribusi beban kerja antara 3 staf teknis pembenihan, diperlukan penambahan staf teknis pembenihan yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan komoditas ikan (1 staf : 1 komoditas) guna menjaga efisiensi serta kualitas produksi benih (efisiensi).

REFERENSI

- Aisyah, S., Arfiana, B. S. M., Rustam, D., & Siahaan, T. (2022). Kajian Faktor Keberhasilan Balai Benih Ikan (BBI) Sukomananti Pada Kegiatan Budidaya Ikan Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Pundi*, 6(1).
- Arisandi, D. M., & Sambah, A. B. (2022). Pemetaan Potensi Pengembangan Perikanan Budidaya Di Wilayah Pesisir Kota Probolinggo. *JURNAL LEMURU*, 4(1), 1–13.
- Dokumen Laporan Implementasi Aksi Perubahan “Sambang Budiman” (2024).
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press: Vol. Edisi kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ernawati, Nugroho, M., Hidayati, N. I., Soedarmadji, W., & Akbar, M. J. (2024). Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar pada Kelompok Swadaya Masyarakat “Balesemi” di Desa Bakalan Kabupaten Pasuruan. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 889–895. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2195>
- Evi Sastipi. (2023). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Herayani, Y. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Balai Benih Ikan (BBI) Dalam Penyediaan Benih Ikan Berkualitas Di Kabupaten Ciamis. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(5), 272–291.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, Pub. L. No. 21 (2018).
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Rafani, S. R., & Luriana Lubis. (2024). Implementasi Kebijakan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 137–151. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i2.8604>
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Jombang 2024-2026 (2023).
- Sabir, M. R. P., & Mokodompit, E. A. (2023). *Analisis Potensi Maritim Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3>
- Utomo, W. S. (2020). Implementasi Kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Melakukan Pengelolaan Dan Pengawasan Terhadap Sumber Daya Kelautan di Teritorial 0 Sampai 12 Mil Laut

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur). *Dinamika*, 26(1), 12–26.

Wahyuti, W., & Manda, S. (2023). Analisis Peran Balai Benih Ikan (BBI) Rappoa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok Pembudidaya Ikan di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. *FISHIANA Journal of Marine and Fisheries*, 2(1), 30–41.